

Peran Pemerintah dalam Pengetasan Kemiskinan di Kota Medan

Andre Agasi

Mahasiswa Program Pascasarjana Antropologi Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Andree20091999@gmail.com

Keywords:

Role, Government,
Alleviation, Poverty

Abstract: *The Medan City Government in its efforts to carry out development for the sake of creating community welfare basically refers to the goals of the fifth precept of Pancasila which emphasizes the principle of justice. This paper focuses on the government's role in alleviating poverty in the city of Medan. The research method is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this study are that there is a role for the Medan City government in reducing poverty. Poverty arises when a person cannot meet economic needs which are the minimum requirements for living standards such as food, shelter, and work and even education.*

Kata Kunci:

Peran, Pemerintah,
Pengetasan, Kemiskinan

Abstrak: Pemerintah Kota Medan dalam upaya melakukan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu tujuan dari sila kelima Pancasila yang menekankan prinsip keadilan. Tulisan ini memfokuskan pada peran pemerintah dalam pengetasan kemiskinan di Kota Medan. Adapun metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah terdapat peran pemerintah Kota Medan dalam menekan angka kemiskinan. Kemiskinan muncul disaat seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang menjadi kebutuhan minimum dari standar kehidupan seperti makanan, tempat tinggal, dan pekerjaan bahkan pendidikan.

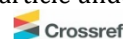
Article History:

Received: 27-03-2023

Online : 05-04-2023



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license



A. LATAR BELAKANG

Pembangunan didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Pembangunan adalah perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Afifuddin, 2012:47). Pembangunan juga pertumbuhan di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu masalah utama yang sulit di selesaikan yaitu penduduk miskin. Sebutan kemiskinan muncul disaat seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang menjadi kebutuhan minimum dari standar kehidupan seperti makanan, tempat tinggal, pekerjaan bahkan pendidikan. Ketika material tidak mampu mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang, maka seseorang itu dikatakan berada dalam keadaan miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan manusia dianggap miskin jika pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan bertambahnya jumlah keluarga miskin, dan keadaan kemiskinan terus memburuk. (Todaro dalam Nisa, 2020:57).

Kemiskinan menjadi tolak ukur terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Berarti kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan. keberhasilan dan kegagalan pembangunan sering kali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Fenomena kemiskinan menjadi masalah pokok terutama di daerah-daerah. Pembangunan ekonomi yang tidak merata membuat realitas kemiskinan bertambah. Penyerapan pemerintah kota mengenai kemiskinan akan menunjukkan integrasi kenegarawan yang kuat. Namun, masalah kemiskinan bukan sekedar menghitung angka-angka melainkan sebuah masalah rumit yang sulit diatasi (Syahwier;2016). Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kemiskinan pada dasarnya ada tiga yaitu kemiskinan relatif yang berada di golongan miskin sebetulnya sudah hidup di atas garis kemiskinan akan tetapi ada dibawah kemampuan penduduk sekitarnya. Selanjutnya, kemiskinan cultural terkait dengan tindakan individu atau kelompok yang menolak untuk berusaha meningkatkan taraf hidup mereka, meskipun ada upaya dari orang lain untuk mengubah kehidupan mereka. Kemiskinan absolute merupakan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan memperoleh sumber daya guna mencukupi kebutuhan dasar dirinya (Zakaria, 2018:26).

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia. Penduduknya yang sangat banyak, kemacetan lalu lintas dan laju mobilitas masyarakat yang tinggi menjadi keseharian yang ada di Kota Medan. Sebagai salah satu kota besar, Medan juga memiliki permasalahannya sendiri sama dengan kota-kota lainnya. Fenomena yang sering kita lihat adalah fenomena penduduk miskin. Kota Medan adalah wilayah yang memiliki angka penduduk miskin tertinggi. Penduduk miskin di Kota Medan sebesar 193.03 ribu penduduk pada tahun 2020 (Rizaty, 2020). Banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut memicu permasalahan sosial yang rumit, seperti menurunnya kualitas sumber daya manusia. Munculnya ketimpangan dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial politik, dan meningkatnya kriminalitas. Jika kondisi tersebut berlangsung terus menerus, maka pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Kota Medan sehingga menyulitkan terwujudnya Kota Medan yang berkah.

Tabel 1. Data Penduduk Miskin di Kota Medan (Ribuan Jiwa)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	204.00	186.45	183.79	183.54	193.03

Sumber: Data BPS Kota Medan

Melihat kondisi angka penduduk miskin di Kota Medan yang masih sangat tinggi, maka berbagai program dan kegiatan terus dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menekan jumlah kemiskinan. Salah satu upaya pengetasan kemiskinan dapat dilakukan melalui program pemerintah Kota Medan ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat memformulasikan sebuah model pengetasan demi menekan angka kemiskinan. Selanjutnya, model tersebut mampu mensimulasikan berbagai kebijakan pengetasan kemiskinan dan mampu digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk miskin di Kota Medan pada masa mendatang.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Moloeng, 2007:4). Selanjutnya, bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan (Sukmadinata, 2017:94).

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengetasan kemiskinan di Kota Medan ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, dengan penelitian kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan gambaran yang nyata mengenai pengetasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Penulis memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar penulis lebih muda untuk dapat memahami dan menggambarkan secara jelas

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Ekonomi

Penyebab kemiskinan sangatlah kompleks sehingga pandangan dalam melihat berdasarkan persoalan nyata dalam masyarakat. Persoalan nyata dalam masyarakat biasanya karena adanya sebagian kelompok yang masuk dalam golongan tidak beruntung yaitu kemiskinan fisik yang lemah dan ketidakberdayaan pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan disertai pemerataan hasil pertumbuhan keseluruhan sektor usaha sangat dibutuhkan dalam upaya menurunnya tingkat kemiskinan. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah upah minimum. Upah Minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat pekerja dengan harapan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 247-252

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Rahma Nurhidayati selaku masyarakat yang berkeja di perusahaan swasta terkait upah minimum adalah sebagai berikut : “Upah Minimum yang diberikan pemerintah Kota Medan sebesar 3.3 Juta. Bahwa dengan gaji perbulannya segitu sebenarnya pas-pasan saja untuk kebutuhan selama satu bulannya, seharusnya pemerintah menyesuaikan kepada kebutuhan pekerja. Selain untuk kebutuhan hidup selama satu bulan pekerja juga bisa dapat menabung dari gaji per bulannya”. (Wawancara, 20 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti melihat bahwa dari upah minimum masyarakat Kota Medan terima perbulannya dianggap masi belum cukup untuk kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan juga untuk menabung, bagi mereka selain gaji yang mereka terima untuk kebutuhan tiap bulannya mereka juga diwajibkan untuk menabung dengan keperluan seperti membeli rumah, membeli kendaraan, dan membeli kebutuhan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya menjadi syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Sedangkan, syarat kecukupannya adalah pertumbuhan ekonomi tersebut harus efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya pertumbuhan hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar, 2006). Persoalan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu hal yang diperhatikan Presiden Joko Widodo untuk ditangani dan diatasi termasuk Kota Medan. Oleh karena itu, sejumlah upaya pun dilakukan Pemerintah Kota Medan agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Pemerintah Kota Medan melakukan program bedah rumah kepada warga yang rumahnya tidak layak huni. Wawancara dilakukan dengan Doddy Artha Putra terkait Program Bedah Rumah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut: “Bedah rumah ini sebenarnya bagus untuk memperbaiki pola hidup masyarakat yang rumahnya tidak kumuh, jika rumah bagus dan nyaman tentulah akan lebih bahagia jika bahagia tentulah akan mempermudah segala aktivitas pekerjaan. Bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Kota Medan bagus sebagai tahap awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun masi banyak rumah-rumah yang tidak layak huni, seharusnya Pemerintah melakukan lebih ekstra dalam mencari dana tambahan dari swasta maupun pemerintah pusat untuk lebih banyak lagi rumah warga di bedah” (Wawancara, 20 Maret 2023)

Aspek Sosial

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mengatasi pengangguran. Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Upaya pemerintah Kota Medan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Medan adalah mempermudah perizinan untuk investor yang mau menanamkan modalnya di Kota Medan. Selain itu pemerintah Kota Medan juga melakukan beberapa pelatihan seperti pelatihan wirausaha dan juga memberikan bantuan kepada UMKM. Selain itu, ada aplikasi yang pemerintah siapkan yaitu Sistem Inovasi Terpadu Ketenagakerjaan (SIDUTA) untuk mengatasi pengangguran di Kota Medan yang dipicu oleh Pemberhetian Hubungan Kerja (PHK).

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 247-252

Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bisa dilakukan dengan distribusi pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dengan upah memadai bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin. Hal ini didukung oleh wawancaranya dengan Muhammad Nashry tentang peran pemerintah dalam penanggulangan pengangguran sebagai berikut: “Dalam melakukan penanggulangan Pemerintah Kota sudah banyak melakukan inovasi untuk menekan angka pengangguran di Kota Medan ini. Misalnya, pembinaan UMKM, aplikasi SIDUTA, pelatihan kerja, mempermudah izin untuk investor, memperbaiki kawasan yang tidak dipakai untuk dijadikan pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Program ini jika terealisasi sesuai target maka akan begitu bermanfaat bagi masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. (Wawancara, 21 Maret 2023).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disebutkan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama dalam pembangunan. Menekan angka pengangguran dengan program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah Kota Medan. Melalui program tersebut masyarakat mampu memanfaatkan inovasi yang sudah dibuat oleh pemerintah. Masyarakat dituntut dalam keberanian memulai kehidupan yang baru demi mensejahterahkan kehidupannya.

Aspek Kesehatan

Pelayanan kesehatan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan ramah. Mengingat bahwa sebuah Negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani (Rukmana, 2013).

Indonesia kondisi pelayanan publik masi tergolong rendah. Dalam sektor pemerintahan, inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah di Indonesia mendorong setiap daerah untuk menghadirkan 3 inovasi. Inovasi dianggap kunci dalam meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing. Pemerintah berupaya terus mendukung daerah untuk berinovasi salah satunya adalah mengeluarkan sebuah program. Pemerintah Kota Medan juga berupaya menghadirkan pelayanan yang berkualitas dengan melahirkan sebuah program inovasi-inovasi yang dapat menyentuh langsung masyarakat. Program yang dibuat pemerintah Kota Medan adalah Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB). Melalui kehadiran program tersebut, masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang semakin baik. Pada saat wawancara dengan Muhammad Ridwan tentang pelayanan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan sebagai berikut: “Program jaminan kesehatan yang diberikan sangat membantu masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang mampu dan belum tercover BPJS Kesehatan masi tetap dapat berobat kerumah sakit dengan menggunakan KTP. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, apabila kita sehat maka kita akan kuat untuk bekerja dan menari uang demi mengubah kehidupan”. (Wawancara, 21 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara di atas, pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah Kota Medan berhasil membuat masyarakat sangat berbahagia. Program jaminan kesehatan ini sangat berdampak bagus untuk masyarakat yang sakit. Mereka diberikan biaya gratis dalam setiap penanganannya. Apabila masyarakat sehat maka akan meningkat kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pelayanan kesehatan yang masyarakat terima, dan lapangan pekerjaan yang masyarakat terima.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan terkait peran pemerintah dalam mengetaskan angka kemiskinan di Kota Medan. Adapun kesimpulannya adalah peneliti melihat bahwa upah minimum masyarakat Kota Medan terima perbulannya masi belum cukup untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu, ada program pemerintah Kota Medan yang merenovasi rumah tidak layak huni yang dimiliki masyarakat. Sehingga apabila program ini jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan.

Salah satu tujuan pembangunan adalah mengatasi pengangguran yang ada di suatu wilayah. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pemerintah melakukan distribusi pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja, pembinaan UMKM, aplikasi SIDUTA, pelatihan kerja, dan mempermudah izin usaha untuk investor masuk. Berdasarkan program tersebut nantinya akan menekan pengangguran di Kota Medan. Hal ini di dukung dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah Kota Medan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesehatan menjadi prioritas pembangunan Kota Medan. Apabila sehat maka akan mudah dalam melakukan segala aktivitas demi mengubah kehidupan

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada orang tua saya dan terimakasih juga kepada dosen pembimbing saya yang telah memberi motivasi semangat dan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*.
- Ginting, A. M., & Dewi, G. P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 117–130. jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/167/112
- Mololeong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, K., Wulandari, A., & Rahayu, R. L. (2020). Pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 55. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.1.55-63>
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Rukmana, N. S. (2013). *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Kecamatan Curio Enrekang Novayanti Sopia Rukmana S. Universitas Hasanuddin Program Studi Administrasi Negara*.
- Siregar, H. (2006). Perbaikan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong Investasi dan Menciptakan Lapangan Kerja. *Jurnal Ekonomi Politik Dan Keuangan*.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Syahwier, C. A. (2016). *Ironi Kemiskinan di Jabar*.
- Zakaria, J. (2013). Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. In *PT. Umitoha Ukhuwah Grafika*.